

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Basri, Faisal dan Haris Munandar. *Lanskap Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil, 2022.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*, Edisi ke-9. Mason: South-Western Cengage Learning, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Redi, Ahmad. *Hukum Energi: Konsep, Sejarah, Asas, dan Politik Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

- Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, Jilid 2*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Soemantri, Sri. *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam: Suatu Tinjauan Konstitusional*. Bandung: PT Alumnus, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

B. Jurnal

- AdhicaHyono, I. Luqman, et al. "Reformasi Pengelolaan Migas dengan Vertical Integrated System guna Mewujudkan Kesejahteraan Berdasarkan Konstitusi." *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 4, No. 2 (Mei 2021): 339–356. <https://doi.org/10.14710/alj.v4i2.339-356>.
- Azhar, M. dan Dendy Satriawan. "Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional." *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 1, No. 4 (November 2018). <https://doi.org/10.14710/jphtcr.v%vi%i.3837>.
- Dinatha, Hendra, Fauzie Yusuf Hasibuan, dan Basuki Rekso Wibowo. "Analysing the Legal Dynamics Involved in the Development of New Renewable Energy in Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* Vol. 1, No. 3 (September 2024). <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i3.195>.
- Hasani, Ismail. "Gagasan Negara Hukum yang Demokratis dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* Vol. 8, No. 4 (Agustus 2011): 521–544.

Puspitasari, Adena Fitri dan Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 1, No. 4 (2022): 410–420.

Riyanto, Sigit. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum* Vol. 17, No. 1 (Januari 2010): 72–90.

Suastama, Ida Bagus Radendra. "Asas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Migas dan Ketenagalistrikan." *Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 2 (Oktober 2012): 330–345. <https://doi.org/10.22146/jmh.16137>.

Tarigan, Jefri Porkonanta. "Inkonstitusionalitas Sistem Unbundling dalam Usaha Penyediaan Listrik." *Jurnal Konstitusi* Vol. 15, No. 1 (Maret 2018): 183–204. <https://doi.org/10.31078/jk1519>.

C. Disertasi

Hariyadi, Ade Reza. "Membahas Konflik Politik Seputar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi." Disertasi Doktor Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2023.

D. Dokumen

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: BPHN, 2023.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 94).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124).

Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan Nomor 002/PUU-I/2003*.

Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003*.

Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015*.

F. Internet/Sumber Daring

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "tinjauan." <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses 1 Mei 2026.

EBSCO Research Starters. "Price Regulation." dalam *Business and Management Research Starters*. <https://www.ebsco.com/research-starters/business-and-management/price-regulation>. Diakses 1 Mei 2026.

Kliklegal. "Kiprah UU Migas di Mahkamah Konstitusi." 3 November 2017. <https://kliklegal.com/kiprah-uu-migas-di-mahkamah-konstitusi/>. Diakses 4 Mei 2026.

Mardiansyah, Diki. "Tak Masuk Prioritas Prolegnas, Nasib RUU Migas Tak Kunjung Jelas." *Kontan.co.id*. <https://industri.kontan.co.id/news/tak-masuk-prioritas-prolegnas-nasib-ruu-migas-tak-kunjung-jelas>. Diakses 18 Mei 2026.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlakuu) DPR RI. "Resume Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003." <https://puspanlakuu.dpr.go.id/perkara/index/page/281>. Diakses 4 Mei 2026.

Safa'at, Muchamad Ali. "Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK." *Hukumonline*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-pelaksanaan-putusan-mk-yang-membatalkan-norma-cl4222/>. Diakses 4 Mei 2026.